

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA SEMARANG TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Edy Suprianto

Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstract

Every state has the purpose of this research is to assess the effect of local government income on the allocation of social budget. This research is replication of previous research which conducted by Novi Pratiwi (2007) about the effect of public allocation fund and local government income on district budget in all of local government in Indonesia. The population of research are all of work unit in local government in Semarang, Central Java, Indonesia. While samples were selected used purposive random sampling with criterias : first, work unit had reported their financial reporting in periode during 2010 until 2011. Second, work unit must report their budget specially for social budget every year. Regression is used to analyse the data. Based on the research result, we can conclude that local government income have not affect positif significantly on the allocation of social budget. It is supported by the result of on the regression analysis where degree of significance less than 1,96. This result indicated that all of government organization have to more focus on social budget. It is important because it can reduce sum of poverty in Indonesia and this research give evidence that government budget must more focus on citizen welfare.

Keyword : local government, income resources, social budget, and poverty

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi anggaran sosial di pemerintah kota Semarang. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novi Pratiwi (2007) tentang pengaruh alokasi pendanaan publik dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sementara sampel dipilih dengan menggunakan purposive random sampling dengan kriteria sebagai berikut : pertama, SKPD melaporkan laporan keuangannya dari periode 2010 sampai dengan 2011, Kedua, SKPD secara khusus melaporkan anggarannya khusus untuk bantuan sosial secara berturut-turut setiap tahunnya. Untuk menganalisis data menggunakan alat analisis regresi. Berdasarkan pada hasil penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran sosial. Hal ini didukung oleh hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% atau di bawah t-tabel 1,96. Hasil ini mengindikasikan bahwa semua unit atau organisasi atau SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang harus lebih memfokuskan atau mengutamakan anggaran sosial. Hal ini sangat penting untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa pemerintah harus mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: pemerintah daerah, pendapatan daerah, anggaran sosial, kemiskinan

Pendahuluan

Permasalahan setiap negara di dunia yang paling besar adalah masalah kemiskinan. Permasalahan ini yang sekarang sedang dialami oleh Negara Indonesia termasuk di Kota Semarang. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara. Untuk menjamin kesuksesan program pemerintah ini maka diperlukan sumberdaya ekonomi yang maksimal.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus

mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim,2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Undang-undang otonomi daerah ini secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengentaskan masalah kemiskinan di daerahnya masing-masing termasuk pemerintah daerah Kota Semarang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 jumlah kemiskinan di Kota Semarang sebesar 141.000 orang. Mereka inilah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang untuk mensejahterakannya. Pemerintah harus mengatur belanja operasinya khusus belanja sosial semaksimal mungkin untuk mengentaskan kemiskinan di kota semarang. Penelitian ini lebih fokus atau mengarah pada jenis pengeluaran atau belanja ini serta dampaknya pada tingkat kemiskinan di kota semarang.

Peneliti sebelumnya, seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi Belanja Langsung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Novi Pratiwi (2007) yaitu Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya : pertama, penelitian sebelumnya mengambil obyek kabupaten/kota seluruh Indonesia sedangkan peneliti ini lebih fokus pada Pemerintah Kota Semarang. Kedua, penelitian sebelumnya meneliti secara umum pada belanja daerah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada belanja operasi khususnya belanja sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: pertama, apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak berpengaruh terhadap alokasi belanja sosial. Kedua, apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi berpengaruh terhadap alokasi belanja sosial.

Telaah Pustaka

Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh

pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam

Pratiwi, 2007). Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) belanja selain modal (belanja administrasi umum; belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; belanja transfer; belanja tak terduga). (2) belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum.

Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari pendapatan

asli daerah (Pratiwi, 2007). Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan, daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002): 1). pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 2). retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan

PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.

Penelitian dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasil menunjukkan bahwa sandaran pmda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU, tetapi untuk satu tahun ke depan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat (salah satunya DAU).

Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra (Maemunah, 2006). Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pada (1) pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatra; (2) kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatra; (3) kecenderungan *flypaper effect* menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah; (4) kemungkinan adanya perbedaan *flypaper effect* antara pemerintah kabupaten/kota yang PAD-nya tinggi dengan pemerintah kabupaten/kota yang PAD-nya rendah; dan terakhir (5) pengaruh DAU dan PAD pada kategori pengeluaran sektor yang berhubungan langsung dengan publik (belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum).

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada lima simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: pertama, besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besarnya belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telah terjadi *flypaper effect* pada

belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi belanja daerah periode kedepan. Keempat, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Kelima atau terakhir, tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah bidang pendidikan, tetapi telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja alokasi belanja tidak langsung dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah alokasi belanja langsung pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan

pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Colombatto (2001) dalam Syukriy dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik. Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan pendapatan asli daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja sosial.

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja sosial.

Metode Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, sedangkan *sampel* dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria :1) laporan keuangan yang dipilih hanya pada periode 2010 sampai dengan 2011. 2) SKPD yang melaporkan PAD dan

Bantuan sosial di dalam laporan keuangannya.

Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua variabel independen yaitu PAD dari pajak dan PAD dari retribusi dan satu variabel dependen yaitu belanja sosial. Belanja sosial adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran khusus untuk bantuan sosial seperti hibah, sumbangan dan lain-lain (Halim, 2002). Rumus untuk menghitung alokasi belanja sosial yaitu: prosentase belanja sosial dengan belanja operasional.

Belanja sosial = jumlah belanja sosial selama periode tertentu

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Dalam penelitian ini rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi dua yaitu:

PAD pajak = jumlah penerimaan asli daerah dari pajak daerah

PAD retribusi = jumlah penerimaan asli daerah dari retribusi daerah

Teknik Analisis

Regresi linier berganda yaitu studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas / bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi / nilai rata-rata variabel dependen yang diketahui (Imam Ghazali, 2001). Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja sosial

a = Konstanta

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak
b = Koefisien Regresi

X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi
e = Error Term

Hasil Penelitian & Pembahasan

Dari 50 SKPD yang ada di Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya, maka diperoleh sebanyak 18 SKPD yang telah memenuhi kriteria. Penelitian ini mengambil periode dua tahun sehingga jumlah sampel yang diperoleh menjadi 36 sampel. Jumlah sampel ini berdasarkan persyaratan data statistik telah memenuhi kriteria minimal sebanyak 30 sampel. Data sampel dalam penelitian ini dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2
Data Sampel

No	Nama SKPD	PAD		Bantuan Sosial	
		2010	2011	2010	2011
1	Dinas Kesehatan	2,452,925,872	2,698,218,459	10,744,434,431	11,818,877,874
2	RSUD	17,098,253,332	18,808,078,665	-	-
3	Dinas Bina Marga	5,570,000	6,127,000	-	-
4	Dinas PSDA & ESDM	41,000,000	45,100,000	-	-
5	Dinas Kebakaran	20,299,000	22,328,900	271,307,750	298,438,525
6	Dinas Tata Kota	6,442,360,350	7,086,596,385	491,162,700	540,278,970
7	Dinas Penerangan Jalan	7,695,969,010	8,465,565,911	1,647,000	1,811,700
8	Dinas Perhubungan	4,602,879,125	5,063,167,038	24,046,000	26,450,600
9	Badan Lingkungan Hidup	97,995,583	107,795,141	445,502,600	490,052,860

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kota Semarang Terhadap
Belanja Bantuan Sosial Di Kota Semarang**

(Edy Suprianto)

No	Nama SKPD	PAD		Bantuan Sosial	
		2010	2011	2010	2011
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	3,553,232,000	3,908,555,200	-	-
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,984,838,000	2,183,321,800	-	-
12	Dinas Sosial, pemuda & Olah raga	863,790,800	950,169,880	236,492,600	260,141,860
13	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1,905,525,650	2,096,078,215	46,503,000	51,153,300
14	Sekretariat Daerah	379,019,325	416,921,258	392,027,000	431,229,700
15	DPKAD	168,591,116,306	185,450,227,937	-	-
16	Dinas Pertanian	56,693,000	62,362,300	31,789,000	34,967,900
17	Dinas Kelautan & Perikanan	16,747,750	18,422,525	-	-
18	Dinas Pasar	7,153,477,190	7,868,824,909	-	-

Sumber: Data yang diolah (2013)

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	PAD (dalam milyar Rp)	Ban_Sosial (dalam milyar Rp)
Mean	96.216,2	204,4
Std. Deviation	2.18451E2	201.06099
Minimum	1.00	1.00
Maximum	950.00	540.00
Sum	3560.00	4089.00

Sumber : Data yang diolah (2013)

Berdasarkan Tabel 3 tentang statistik deskriptif dijelaskan bahwa jumlah rata-rata pendapatan asli daerah dan bantuan sosial di pemerintah daerah selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar Rp 96.216,2 milyar dan Rp 204,4 milyar. Artinya sekitar 0,2 % PAD dari Pemerintah Kota Semarang yang dialokasikan untuk bantuan sosial. Data secara lengkap mengenai data PAD dan bantuan sosial dapat dilihat di Tabel 3 di bawah ini.

Analisis Hasil Studi

Dari 36 sampel yang diperoleh lalu dilakukan pengujian regresi sederhana. Pada tahap ini tidak dilakukan uji asumsi klasik karena uji regresi yang dilakukan hanya uji regresi

sederhana. Jadi diasumsikan semua data telah memenuhi kriteria data yang disyaratkan dalam uji regresi. Berikut ini adalah hasil uji regresi sederhana seperti pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	209.349	51.339		4.078	.001
PAD	-.037	.169	-.051	-.217	.830

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	209.349	51.339		4.078	.001
PAD	-.037	.169	-.051	-.217	.830

a. Dependent Variable:

Ban_Sosial

Sumber : data primer yang diolah (2013)

$$Y = 209.349 - 0,37 X_1 + e$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas memberikan pengertian bahwa :

- Nilai konstanta bernilai 209.349, artinya apabila variabel PAD konstan, maka bantuan sosial SKPD sebesar Rp 209.349 milyar .
- b_1 (nilai koefisien regresi X_1) bernilai negatif sebesar, 0,37. hal ini mempunyai arti bahwa PAD meningkat maka akan dapat menurunkan bantuan sosial SKPD.

Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi bahwa penghasilan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap bantuan sosial. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi pada Tabel 4 diperoleh hasil uji nilai t-statistik sebesar -0,217 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,96. Sedangkan nilai koefisien estimasi (β) sebesar 0.830. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima artinya bahwa penghasilan asli daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap bantuan sosial. Dengan demikian, maka **hipotesis ditolak**.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa penghasilan asli daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap bantuan sosial di

Pemerintah Kota Semarang. Hasil ini tidak mendukung sekaligus menolak hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Mardiasmo, 2002 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Hasil statistik juga menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa b_1 (nilai koefisien regresi X_1) bernilai negatif sebesar, 0,37. hal ini mempunyai arti bahwa PAD meningkat maka akan dapat menurunkan bantuan sosial SKPD. Dalam hal ini disebabkan karena ada beberapa SKPD yang memiliki PAD kecil namun mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial yang lebih besar. Alokasi anggaran bantuan sosial ini diperoleh dari PAD yang diperoleh dari SKPD lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih minimnya alokasi anggaran Pemerintah Kota Semarang untuk bantuan sosial. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah yang berusaha untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Kota Semarang harus lebih banyak menaruh perhatian pada tujuan ini sehingga akan tercipta kehidupan yang layak bagi masyarakat di Indonesia pada umumnya dan di Kota Semarang secara khusus.

Namun bila dilihat dari sisi peran Pemerintah Kota Semarang dalam mengentaskan kemiskinan ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas masyarakat. Pemerintah kota semarang berharap tercipta masyarakat yang mandiri dan profesional, sehingga diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, namun dapat

menciptakan kreativitas secara jangka panjang. Hal ini secara jangka panjang akan membawa dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian dengan didasarkan pada kajian yang telah dilakukan adalah penghasilan asli daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap bantuan sosial di Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama, sampel dalam penelitian ini hanya sebanyak 36 sampel, hal ini cukup sedikit jika dibandingkan banyaknya SKPD di Pemerintahan Kota Semarang, maka pada penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel menjadi lebih besar. Kedua, berdasarkan hasil R-Square diperoleh nilai sebesar 0,051 artinya pengaruh PAD sangat kecil sekali jika dibandingkan variabel lainnya diluar model ini sekitar 0,946 %. Maka disarankan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba 4.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba 4.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin. Makassar. 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam, dan Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan* (Edisi 4). Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS* (Edisi 4). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Jakarta: Salemba 4.
- Isdijoso, Brahmantio. 2002. "Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)". *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol. 6 No. 1.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di*

- Indonesia. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Safitri, Nurul Aisyiah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uman 2002. *Research Method for Business : A skill Building Approach, 7th Edition*. New York: John Wiley and Sons.
- Singgih, Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sukriy dan Halim Abdullah. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159. Surabaya. 16-17 Oktober.
- Triwidodo, Pambudi. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali. Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.